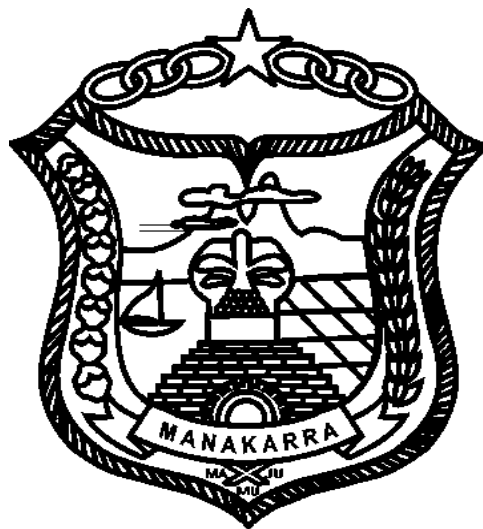


**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

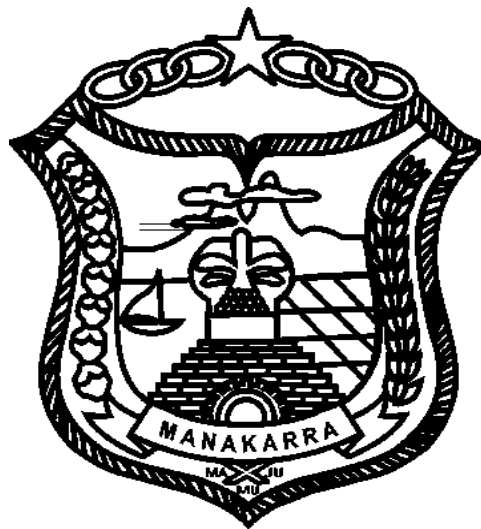
TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2025**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2024



**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat Rakhmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini menjadi bahan evaluasi, identifikasi, pembelajaran dan masukan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan serta sebagai umpan balik bagi seluruh jajaran aparatur lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, untuk meningkatkan pola kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan (*continously improvement*) untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Juga diharapkan, laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang secara partisipatif untuk ikut memantau serta memetik hasil dari kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju secara menyeluruh.

Mamuju, 22 Januari 2025

KEPALA BADAN,

HERMAN, SE

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 197306042002121006





DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB. I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
	C. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. RENCANA STRATEGIS	9
	B. PERJAJIAN KINERJA	16
	C. RENCANA KERJA	17
BAB. III	PENGUKURAN KINERJA	19
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
	B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB. IV	PENUTUP	34
	A. SIMPULAN	35
	B. SARAN-SARAN	35

Lapimran-Lampiran





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan berupa fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan dengan mengedepankan wewenang yang mengacu pada asas-asas umum pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 3 dengan tujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalagunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Olehnya itu pemerintahan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan syarat penting bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terlegitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepeotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dapat diukur melalui penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kebijakan tersebut dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP yang selanjutnya berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap awal tahun anggaran berikutnya dengan bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta merupakan suatu upaya perbaikan berkesinambungan setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, melalui pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LAKIP Tahun 2024 ini selanjutnya disusun berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun 2021-2026

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju (selanjutnya disingkat dengan BKPP Kabupaten Mamuju) yang awalnya bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan



Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi

Untuk terlaksananya tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju mempunyai fungsi sebagai berikut:

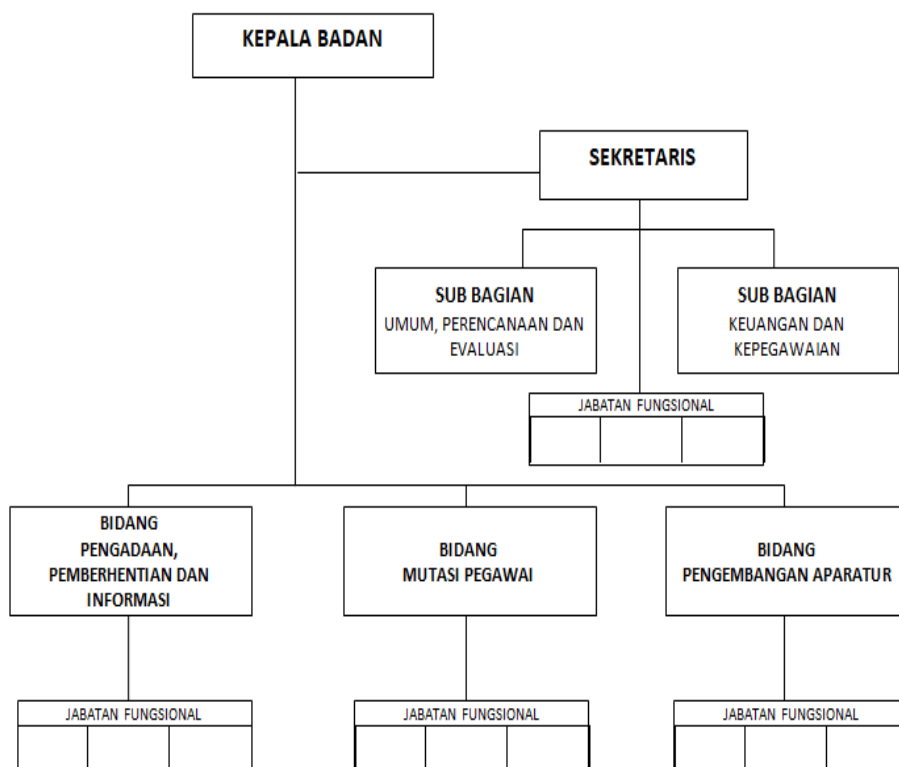
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, Susunan organisasi tersebut terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Bidang Mutasi dan Promosi serta Bidang Pengembangan Aparatur. Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1.
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU



Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju pada tahun 2024 didukung oleh jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 51 personil. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 37 PNS dan Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas 14 Orang. Klasifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan jabatan ditabulasikan dalam Tabel 1.1.

1. Klasifikasi

Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, PNS dalam lingkup Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju terdiri atas:



- a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi (setingkat eselon II-b) sebanyak 1 orang.;
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III-a) sebanyak 1 orang.;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator (setingkat eselon III-b) sebanyak 3 orang.;
- d. Kepala Subbagian dan merupakan jabatan pengawas (setingkat eselon IV-a) sebanyak 2 orang.;
- e. Fungsional Tertentu hasil Penyetaraan jabatan pengawas (setingkat ahli muda) sebanyak 7 orang dan 4 orang dari hasil Seleksi CPNS (setingkat ahli pertama)
- f. Pelaksana sebanyak 18 orang. dan
- g. Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas sebanyak 14 Orang

Untuk semua formasi Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2024 sudah terisi oleh pejabat definitif dengan golongan ruang yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN,
PANGKAT DAN JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KAB. MAMUJU TAHUN 2024**

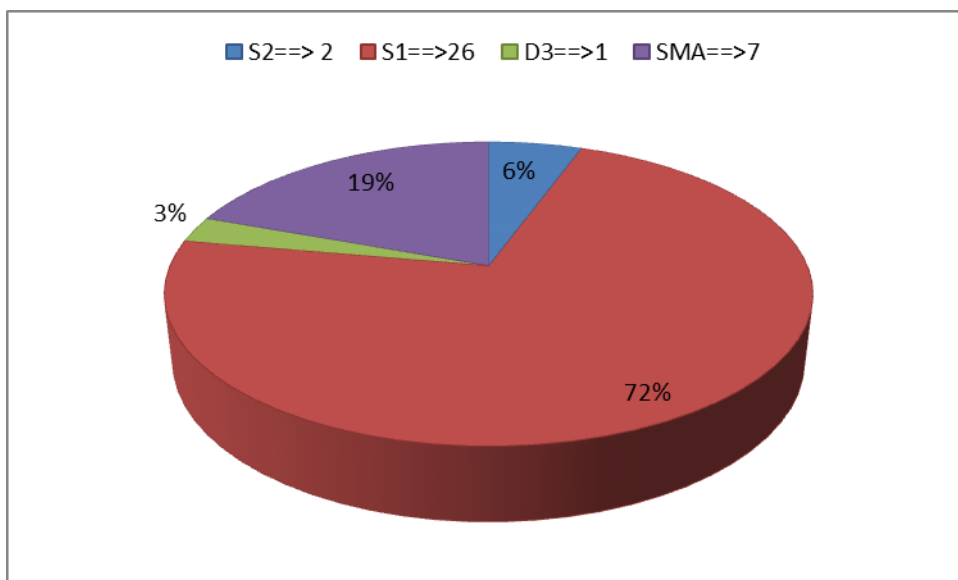
PENDIDIKAN		PANGKAT		ESELON	
JENJANG	JUMLAH (ORANG)	JENJANG	JUMLAH (ORANG)	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
SD	-	Juru Muda	-	Pimpinan Tinggi	1
SLTP	-	Juru Muda Tingkat I	-	Administrator	4
SLTA	7	Juru	-	Pengawas	2
Sarjana Muda (D.1)	-	Juru Tingkat I	-	Fungsional	11
Sarjana Muda (D.2)	-	Pengatur Muda	0	Pelaksana	18
Sarjana Muda (D.3)	1	Pengatur Muda Tingkat I	0	JUMLAH	36
Sarjana (S.1)	26	Pengatur	3		
Pasca Sarjana (S.2)	2	Pengatur Tingkat I	2		
Doktoral (S.3)	-	Penata Muda	6		
JUMLAH	36	Penata Muda Tingkat I	7		
		Penata	5		
		Penata Tingkat I	7		
		Pembina	5		
		Pembina Tingkat I	1		
		Pembina Utama Muda	-		
		Pembina Utama Madya	-		
		Pembina Utama	-		
		JUMLAH	36		



Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah paling besar adalah tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) orang. Hal ini menggambarkan bahwa cukup banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana, sehingga diharapkan cukup mampu mendukung kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju memiliki tingkat pendidikan SLTA/SMK, D3, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju serta Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Instansi Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling berkaitan. Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, wajib membangun



hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun sinergi tugas dan fungsi masing-masing, baik dalam internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju maupun dengan perangkat daerah lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pendukung dalam perangkat daerah.

Isu-isu Strategis yang dihadapi BKPP Kabupaten Mamuju

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju diharapkan mampu berbagai permasalahan yang dihadapi melalui program dan kegiatan. Permasalahan tersebut disebutkan sebagai isu-isu strategis, diantaranya :

1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Belum tersusunnya perencanaan ASN yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis pada kinerja;
3. Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatan sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan riil organisasi;
4. Pengembangan kompetensi ASN belum bisa dilaksanakan secara optimal;
5. Kualitas sistem informasi kepegawaian yang belum maksimal.
6. Aparatur Sipil Negara memiliki kinerja yang rendah (under performance).

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan kinerja BKPP Kabupaten Mamuju tahun 2024 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 6. Analisis atas efisien penggunaan sumber daya.
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BKPP TAHUN 2021 – 2026

Rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 termuat dalam dokumen Renstra yang berisi perencanaan lima tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju. Renstra menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan Kabupaten Mamuju bidang kepegawaian Pendidikan dan pelatihan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Ringkasan mengenai rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kinerja ASN Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah	Mengotimalkan fungsi Sekretariat sebagai koordinator perumusan kebijakan dan peayanan administrasi	1. Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan. 2. Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah 3. Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Menyelenggarakan penyusunan formasi ASN dan seleksi penerimaan Calon ASN	1. Penyusunan formasi ASN secara elektronik yang sesuai kebutuhan dan standar kompetensi jabatan 2. Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon ASN dan PPPK secara terbuka, transparan, bebas KKN dan objektif untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas;



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Menyelenggarakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban aparatur sipil negara	1. Pembinaan dalam upaya penegakan peraturan disiplin aparatur sipil Negara 2. Penilaian kinerja aparatur sipil negara 3. Pemberian Penghargaan berupa Kenaikan Pangkat PNS
			Mengembangkan kompetensi dan kapasitas ASN melalui pendidikan formal dan non formal	Pemberian kesempatan kepada PNS untuk menempuh pendidikan sesuai ketentuan Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop
			Mengembangkan karir PNS berdasarkan formasi	1. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 2. Penyelenggaraan Assesment (Penilaian) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas 3. Penataan jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan standar kompetensi 4. Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dalam JPT secara terbuka dan kompetitif.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju ditetapkan berdasarkan faktor-faktor prioritas pada isu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk mewujudkan Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju adalah “*Meningkatnya Kinerja ASN Daerah*”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju adalah target atau hasil yang diharapkan dari program-program atau keluaran yang diharapkan dari



kegiatan selama lima tahun. Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju merupakan tujuan integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan pondasi dalam mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran tersebut juga akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dalam Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju. Selain itu, sasaran jangka menengah sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik, yang bermakna bahwa pencapaian seluruh sasaran akan saling berkesinambungan dengan pencapaian tujuan.

Berdasarkan tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju, maka sasaran jangka menengah antara lain :

Tujuan : *Meningkatnya Kinerja ASN Daerah*, dengan **sasaran** yaitu :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah
- Meningkatkan Profesionalitas ASN Daerah

Strategi dan Kebijakan

Strategi disusun secara optimal untuk mewujudkan tujuan yang dirumuskan dan dirancang secara konseptual, analitik, idealistik, rasional dan komprehensif, dengan menggunakan pendekatan analisis. Strategi yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mengotimalkan fungsi Sekretariat sebagai koordinator perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi.
2. Menyelenggarakan penyusunan formasi ASN dan seleksi penerimaan Calon ASN.
3. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban aparatur sipil Negara.
4. Mengembangkan kompetensi dan kapasitas ASN melalui pendidikan formal dan non formal.
5. Mengembangkan karir PNS berdasarkan formasi



Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang akan dijabarkan setiap tahunnya. Suatu kebijakan sepatutnya mampu memberikan petunjuk, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan, memberikan informasi mengenai bagaimana strategi yang akan dilaksanakan, dan memberikan keyakinan bagi pelaksana terhadap upaya implementasi.

Kebijakan dalam rangka penetapan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan fungsi SPIP Perangkat Daerah.
3. Penyusunan dokumen pelaporan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyusunan formasi ASN secara elektronik yang sesuai kebutuhan dan standar kompetensi jabatan
5. Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon ASN dan PPPK secara terbuka, transparan, bebas KKN dan objektif untuk mendapatkan aparatur sipil negara yang berkualitas
6. Pembinaan dalam upaya penegakan peraturan disiplin aparatur sipil Negara
7. Penilaian kinerja aparatur sipil Negara
8. Pemberian Penghargaan berupa Kenaikan Pangkat PNS
9. Pemberian kesempatan kepada PNS untuk menempuh pendidikan sesuai ketentuan
10. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek/Seminar/Lokakarya/Workshop
11. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
12. Penyelenggaraan Assesment (Penilaian) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
13. Penataan jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan standar kompetensi
14. Penyelenggaraan Seleksi Pengangkatan dalam JPT secara terbuka dan kompetitif.



Program dan Kegiatan

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju untuk Tahun 2024 memuat 3 Program yang terurai dalam 12 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dalam rangka mencapai 2 sasaran strategis. Kegiatan menjadi penjabaran program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIAHAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



NO	SASARAN STRATEGIK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 5. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 6. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4. Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 3. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai



NO	SASARAN STRATEGIK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Indikator Kinerja

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju yang memuat 3 Program, 14 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Penjabaran tersebut melalui berbagai tahapan pembahasan yang diharapkan dapat mewujudkan Penentuan indikator yang merupakan indikator kinerja program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju merupakan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, termasuk Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju.

Indikator kinerja dalam mencapai tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju terdiri atas indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program, yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian sasaran dan program (lihat Tabel 2.3). Selain itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju juga menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait dengan hal utama apa yang akan diwujudkan sehingga menjadi *core areal business* sebagaimana tugas dan fungsi serta kewenangan utama perangkat daerah. Indikator kinerja digunakan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam penyusunan Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja, LKjIP/LAKIP serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Indikator kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju.



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kinerja setiap tahunnya menjadi berkesinambungan.

Tabel 2.3

**INDIKATOR KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021-2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-				
					I	II	III	IV	V
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Predikat SAKIP	---	---	---	B	B	B	BB	BB
2.	Meningkatkan Profesionalitas ASN	---	---	---	50,05	51,00	51,50	51,80	52,00

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju telah melakukan perjanjian kinerja dengan Bupati Mamuju pada awal tahun 2024, yang berisi komitmen untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Indikator kinerja maupun target tahunan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut merupakan indikator kinerja utama yang mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan dalam RPJMD. Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 berdasarkan sasaran dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	51,50

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.480.424.076,-	APBD
2	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 552.091.800,-	APBD
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 296.553.200,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 4.329.069.076,-	

C. RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024

Penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 tertuang dalam Rencana Kerja 2024. Rencana Kerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja merupakan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan menjadi pembanding dalam pengukuran keberhasilan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana Kerja menjadi wujud komitmen seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang sebaik-baiknya untuk memenuhi misi organisasi.



Tabel 2.4.

**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU**

NO	SASARAN STRATEGIK	INDIKTOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
				KINERJA	ANGGARAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah	Predikat SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	Rp. 3.480.424.076,-
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesional ASN	Program Kepegawaian Daerah	51.50	Rp. 552.091.800,-
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Rp. 296.553.200,-
Total					Rp. 4.329.069.076,-





BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tertuang dalam Laporan Kinerja, yang memuat hasil pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta menjadi upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya *gap* kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara triwulan dan tahunan yang menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja BKPP Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dilakukan dengan 7 cara sebagaimana tercantum dalam Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Cara pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan perlu



dianalisis, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan laporan akuntabilitas tahun ketiga bagi BKPP Kabupaten Mamuju dalam periode Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian pencapaian indikator kinerja sasaran berpedoman pada Skala Nilai Peringkat Kinerja (*lihat* Tabel 3.1) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VII Tabel VII.C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pedoman tersebut juga menjadi kriteria dalam melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja.

Tabel. 3.1.
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gradasi nilai kinerja setiap indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- b. Hasil Sedang, yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- c. Hasil Rendah dan Sangat Rendah, yang menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



A. CAPAIAN KINERJA BKPP TAHUN 2024

Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju tahun 2024 menunjukkan hasil yang dijabarkan pada Tabel. 3.2. Capaian kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju tahun 2024 menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dengan target yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2.

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan	1. Predikat Sakip	Huruf	B		-
2. Meningkatkan Profesionalitas ASN	2. Indeks Profesional ASN	%	51.50	73,67	143,04%
Rata-rata Capaian					143,04%

Berdasarkan tabel di atas bahwa target dan realisasi Tahun 2024 indikator kinerja Predikat Sakip tersebut belum bisa diukur karena belum adanya Rilis Capaian secara resmi dari Inspektorat Kabupaten Mamuju dan Reviu terhadap penilaian SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju akan di laksanakan pada Minggu Keempat Januari 2025..

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 diperlukan untuk mengetahui peningkatan/penurunan capaian setiap tahun, yang disajikan dalam Tabel 3.3.



Tabel 3.3.
CAPAIAN IKU PADA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Predikat Sakip	B	B	Tercapai	B	B	Tercapai	B		
2.	Indeks Profesional ASN	50.00	47.29	94.58	51.00	56,6	110,98 %	51.50	73,67	143,04%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis				94.58%			110,98 %			143,04%

Berdasarkan tabel di atas bahwa Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 khusus Indikator kinerja Indeks Profesional ASN mengalami peningkatan sedangkan target Kinerja pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 masih berdasarkan target renstra karena hasil Indeks Profesional ASN baru di ketahui di bulan Juni tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di susun dan di tandatangani di bulan Januari 2024, sedangkan indikator kinerja Predikat Sakip belum bisa diukur karena belum adanya Rilis Capaian secara resmi dari Inspektorat Kabupaten Mamuju.

Reviu terhadap penilaian SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju akan di laksanakan pada Minggu Keempat Januari 2025. Sedangkan Indeks Profesional ASN hasil sementara di bulan September 2024 di download/ tarik data dari aplikasi SIASN dan hasil resminya menunggu rilis dari Badan Kepegawaian Negara di awal bulan februari 2025.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra Tahun 2016-2021

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dalam hal ini adalah tahun ketiga periode Renstra pada tahun 2024, Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 sudah bisa diukur walaupun hasil sementara dan menunggu Rilis Capaian secara resmi baik dari Inspektorat Kabupaten Mamuju maupun dari Badan Kepegawaian Negara, maka kinerja masing-masing indikator dapat di lihat ditabulasikan dalam Tabel 3.4.



Tabel 3.4.

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN MAMUJU**

INDIKATOR KINERJA		2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI S/D 2023	CAPAIAN
1.	Predikat Sakip	B	B	Tercapai	B		
2.	Indeks Profesional ASN	51.00	56,6	110,98%	51.50	73,67	143,04%

Berdasarkan table diatas ada peningkatan realisasi kinerja pada indokator kinerja Meningkatnya Profesional ASN tahun 2023 dengan realisasi 56,6 dan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan yakni 73,63 di posisi bulan September 2024.

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Standar Nasional**

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Propinsi Sulawesi Barat, serta Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tersebut belum bisa diukur atau diperbandikan karena belum adanya Rilis Capaian secara resmi baik dari Inspektorat Kabupaten Mamuju maupun dari Badan Kepegawaian Negara.

Reviu terhadap penilaian SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju akan di laksanakan pada Minggu Keempat bulan Januari 2025. Sedangkan Indeks Profesional ASN hasil sementara nya di download/ tarik data di bulan September 2024 melalui aplikasi SIASN. dan hasil resminya menunggu rilis dari Badan Kepegawaian Negara di awal bulan februari 2025.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Di lihat dari tabel diatas capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena sudah adanya peremajaan data melalui SIASN utamanya data kompetensi pegawai sehingga sudah ada yang mencapai target. Indikator kinerja bahkan melebihi target yang ada di renstra.



Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 pada sasaran strategis ini sebesar 73,67 dari target kinerja sebesar 51,50. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 56,60 maka terjadi peningkatan pencapaian kinerja sedangkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut sudah bisa diukur walaupun masih data sementara dan masih menunggu Rilis Capaian secara resmi baik dari Inspektorat Kabupaten Mamuju maupun dari Badan Kepegawaian Negara.

Reviu terhadap penilaian SAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju akan dilaksanakan pada Minggu Keempat Januari 2025. Sedangkan Indeks Profesional ASN hasil sementara sudah di download/tarik data di bulan September 2024 melalui aplikasi SIASN dan hasil resminya menunggu rilis dari Badan Kepegawaian Negara di awal bulan Februari 2025.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Efisiensi anggaran, dapat dilihat pada Tabel 3.9 bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggaran yang lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dilaksanakan melalui 3 program, 13 kegiatan dan 38 Sub. Kegiatan yang ditabulasikan pada Tabel 3.9.



Tabel 3.9.

**PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024**

SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah			
NO	SASARAN STRATEGIK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
			6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
			7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			4. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



NO	SASARAN STRATEGIK	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SASARAN 2: Meningkatkan Profesionalitas ASN Daerah			
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
			3. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			4. Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
			5. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
			1. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
			2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
			1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
			2. Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
			3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			4. Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
			3. Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
			4. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
			1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju pada urusan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan dengan total alokasi Anggaran



Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.329.069.076,- yang terealisasi sebesar Rp 4.292.442.828,- atau sebesar 99,15% dari Total Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

➤ **Belanja Oprerasi**

Total Anggaran Belanja Operasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.303.319.076,- yang terealisasi sebesar Rp. 4.266.692.828,- atau sebesar 99,15%. Belanja Oprerasi ini dengan kontribusi sebesar 99,41% dari keseluruhan belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupatn Mamuju.

➤ **Belanja Modal**

Total Anggaran Belanja Modal pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 25.750.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 25.750.000,- atau sebesar 100%. Belanja Oprerasi ini dengan kontribusi sebesar 0,59% dari keseluruhan belanja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupatn Mamuju.

Realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya mencapai seratus persen, hal tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektivitas pencapaian sasaran strategis. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 99,15% dan berada di interval 90 - 100%.



Adapun Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada laporan realisasi fisik dan keuangan Tabel di bawah ini:

Tabel 3
Capaian program dan kegiatan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

NO	KEBIJAKAN/SASARAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENS	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaa, pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip BKPP	Skr	B	3.480.424.076	B	3.450.496.461	100	99,14	0,86		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	20.759.400	100	20.759.400	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok.	2	3.228.000	2	3.228.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dok.	1	3.171.000	1	3.171.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok.	1	3.171.000	1	3.171.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dok.	1	2.631.000	1	2.631.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok.	1	2.631.000	1	2.631.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap.	1	2.698.000	1	2.698.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap.	4	3.229.400	4	3.229.400	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	3.064.625.946	100	3.042.055.304	100	99,26	0,74		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	40	2.963.676.128	40	2.941.105.486	100	99,24	0,76		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dok.	12	97.564.418	12	97.564.418	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap.	12	3.385.400	12	3.385.400	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	8.451.800	100	8.451.800	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap.	12	8.451.800	12	8.451.800	100	100,00	0,00		



NO	KEBIJAKAN/SASARAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	209.638.940	100	209.480.789	100	99,92	0,08		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pkt.	2	5.247.800	2	5.247.800	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pkt.	2	18.915.000	2	18.915.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pkt.	2	6.459.840	2	6.459.840	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap.	1	8.479.000	1	8.479.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap.	1	170.537.300	1	170.379.149	100	99,91	0,09		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	25.750.000	100	25.750.000	100	100,00	0,00		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unt.	5	25.750.000	5	25.750.000	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	105.283.348	100	102.283.348	100	97,15	2,85		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap.	2	42.267.948	2	39.267.948	100	92,90	7,10		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap.	1	63.015.400	1	63.015.400	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	45.914.642	100	41.715.820	100	90,86	9,14		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unt.	10	39.407.600	10	35.208.820	100	89,35	10,65		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unt.	3	6.507.042	3	6.507.000	100	100,00	0,00		
2	Meningkatkan Profesionalitas ASN Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesional ASN		50	552.091.800	50	550.520.667	100	99,72	0,28		
		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	100	263.044.700	100	262.987.967	100	99,98	0,02		
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dok.	1	3.000.000	1	3.000.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dok.	1	146.000.000	1	145.943.267	100	99,96	0,04		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dok.	1	5.098.500	1	5.098.500	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lmbg	1	106.255.000	1	106.255.000	100,00	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok.	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dok.	1	1.691.200	1	1.691.200	100,00	100,00	0,00		



NO	KEBIJAKAN/SASARAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENS	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
					KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	%	100	213.065.100	100	212.502.800	100,00	99,74	0,26		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dok.	1	117.720.000	1	117.702.000	100	99,98	0,02		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dok.	1	94.345.100	1	93.800.800	100	99,42	0,58		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dok.	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	55.743.400	100	55.633.800	100	99,80	0,20		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Org.	160	4.000.000	160	4.000.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dok.	1	36.004.400	1	35.894.800	100	99,70	0,30		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Org	70	11.124.500	70	11.124.500	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Org	4	4.614.500	4	4.614.500	100	100,00	0,00		
		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100	20.238.600	100	19.396.100	100	95,84	4,16		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dok.	1	5.374.500	1	4.533.000	100	84,34	15,66		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Org.	46	4.507.000	46	4.507.000	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Org.	150	6.338.500	150	6.338.500	100	100,00	0,00		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lap.	1	3.018.600	1	3.017.600	100	99,97	0,03		
		Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dok.	1	1.000.000	1	1.000.000	100	100,00	0,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan asumber daya aparatur sesuai bidangnya	%	100	296.553.200	100	291.425.700	100	98,27	1,73		
		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	296.553.200	100	291.425.700	100	98,27	1,73		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Lap.	1	296.553.200	1	291.425.700	100	98,27	1,73		
Jumlah					100	4.329.069.076	100	4.292.442.828	100	99,15	0,85		



Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis dan dievaluasi capaian kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan tahun 2024 berdasarkan kesesuaian capain kinerja output terhadap program yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata mencapai 99,15% dan berada di interval 90 - 100%.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pencapaian sasaran diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama terdiri atas 2 indikator kinerja untuk mencapai 2 sasaran strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2024. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

LAKIP ini disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 yang merupakan gambaran Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Kabupaten Mamuju tahun 2021 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2024 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2024.



Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2024 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

A. Simpulan

Dari hasil analisis kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju di peroleh kesimpulan :

1. Pencapaian kinerja kebijakan secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran/Dana sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan dalam merealisasikan kebijakan dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan.

B. Saran-saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, pendataan, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju

Semoga LAKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 ini dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju pada tahun mendatang.



